



## SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

---

### **BPK PANTAU PENYERAHAN BSM SE-KABUPATEN KLATEN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Klaten, Jumat (14 Februari 2014).** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyelenggarakan acara “Pemantauan dan Penyerahan Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk Siswa se-Kabupaten Klaten oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di GOR Gelarsena Jl. Mayor Sunaryo, Klaten Utara Pukul 08.00 WIB – Selesai.

Program BSM adalah Program Nasional yang bertujuan menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, serta membantu kelancaran program sekolah.

Dana BSM diberikan kepada siswa mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan besaran sebagai berikut:

1. BSM SD dan MI sebesar Rp360.000,00 per tahun;
2. BSM SMP dan MTs sebesar Rp550.000,00 per tahun;
3. BSM SMA, SMK dan MI sebesar Rp780.000,00 per tahun dan;
4. BSM Perguruan Tinggi sebesar Rp1.200.000,00 per tahun.

Pada tahun 2012 alokasi dana BSM yang disalurkan oleh Kemendikbud adalah sebesar Rp2,82 triliun untuk 5,75 juta siswa miskin, sedangkan alokasi dana BSM pada Kemenag sebesar Rp0,99 triliun untuk 1,81 juta siswa miskin sehingga total alokasi dana adalah sebesar Rp3,81 triliun untuk 7,56 juta siswa miskin. Permasalahan klasik yang timbul pada setiap program bantuan pemerintah termasuk pada program BSM adalah penyaluran realisasi yang lambat.

Oleh karenanya, BPK RI menyelenggarakan acara Pemantauan dan Penyerahan BSM untuk Siswa dengan tujuan untuk mendorong proses penyaluran BSM yang tepat waktu dan tepat sasaran, serta mencari solusi bersama permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program tersebut. BPK RI selaku lembaga pemeriksa keuangan negara berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Salah satu bidang prioritas pemeriksaan BPK yang sangat strategis adalah bidang pendidikan. Besarnya anggaran pendidikan membuat realisasi anggaran pendidikan termasuk BSM sangat rawan terjadinya penyalahgunaan.

Acara ini dihadiri oleh Anggota VI BPK RI (**Dr. H. Rizal Djali**), Anggota Komisi XI DPR RI (**M. Hatta**), dan Dirjen Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (**Prof. Dr. Ir. Ahmad Jazidie, M.Eng**), Bupati Klaten, dan seluruh unsur Forkompimda Kabupaten Klaten.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Pemantauan dan Penyerahan BSM oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada Siswa miskin di Kabupaten Klaten, BPK RI berharap penyaluran BSM menjadi lebih tepat waktu dan tepat sasaran.

**Subbagian Hukum dan Humas**

---

*Info lebih lanjut:*

*Kasubbag Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Supriyonohadi, SH, MSi.*

*Telp. 024-8660825*

*Faks.024-8660884*

*Website: [www.semarang.bpk.go.id](http://www.semarang.bpk.go.id)*